

**KEBIJAKAN TRANSMIGRASI LOKAL DI LAMPUNG TAHUN 1979-1984**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**INTAN PRATIWI**

**NPM 1913033017**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN TRANSMIGRASI LOKAL DI LAMPUNG TAHUN 1979-1984**

**Oleh**

**Intan Pratiwi**

Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung tahun 1979-1984 merupakan suatu strategi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah Lampung guna menyelesaikan permasalahan terkait pemerataan persebaran jumlah penduduk daerah Lampung yang pada tahun 1970an ketidakmerataan persebaran penduduk sehingga menyebabkan pembangunan daerah yang tidak merata. Hal itu kemudian menjadi permasalahan utama dalam proses kemajuan daerah Lampung yang terkesan pembangunan hanya terpusat pada daerah Lampung Bagian Selatan sehingga daerah Lampung Bagian Utara khususnya mengalami ketertinggalan baik dalam pembangunan daerah maupun dalam bidang perekonomian. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apasajakah dampak sosial dan ekonomi kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung 1979-1984. Penelitian ini menggunakan metode historis karena metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau kondisi sebenarnya yang ada di lapangan terutama dalam kaitannya dengan tema penelitian yaitu implementasi kebijakan transmigrasi lokal di Lampung tahun 1979-1984. Hasil dari penelitian ini adalah Pada Pelita Keempat ditargetkan 35.000 KK penduduk akan di translokkan dan telah dipersiapkan ntuk dimukimkan di daerah Lampung Utara. Sehingga catatan tahun 1982 (akhir tahun) jumlah penduduk Lampung sebanyak 4.858.026 jiwa yang tersebar pada 4 daerah tingkat II yaitu: pada daerah tingkat II Kotamadya Bandar Lampung sebanyak 461.242 jiwa, di dati II Lampung Utara sebanyak 1.028.203 jiwa, di dati II Lampung Tengah sebanyak 1.742.620 jiwa, dan dati II Lampung Selatan sebanyak 1.625.901 jiwa. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Kebijakan ini berjalan baik dengan berkembangnya daerah Lampung Utara yang dipusatkan sebagai daerah target penerimaan masyarakat transmigrasi lokal. Lampung Utara menjadi daerah yang berkembang baik dalam bidang pembangunan maupun perekonomian semenjak diterapkannya kebijakan tranmisgrasi lokal yang menyebabkan pemaksimalan penggunaan lahan di daerah Lampung Utara.

**Kata Kunci : Transmigrasi Lokal, Kependudukan, Lampung**

## ABSTRACT

### ***THE LOKAL TRANSMIGRATION POLICY IN LAMPUNG IN 1979-1984***

***By***

***Intan Pratiwi***

*The Local Transmigration Policy in Lampung in 1979-1984 was a policy strategy implemented by the Lampung regional government to solve problems related to the even distribution of the population of the Lampung area which in the 1970s the uneven distribution of the population led to uneven regional development. This later became the main problem in the process of progress in the Lampung region, where it seemed that development was only centered on the southern part of Lampung, so that the northern part of Lampung, in particular, was lagging behind both in regional development and in the economic sector. The formulation of the problem in this study is: What were the social and economic impacts of the Local Transmigration policy in Lampung 1979-1984. This research uses the historical method because this method aims to describe the actual conditions or conditions that exist in the field, especially in relation to the research theme, namely the implementation of local transmigration policies in Lampung in 1979-1984. The results of this study are that in the Fourth Pelita it is targeted that 35,000 households of residents will be translocated and have been prepared to be resettled in the North Lampung area. So that in 1982 (end of year) the population of Lampung was 4,858,026 people spread across 4 level II regions, namely: in the level II area of Bandar Lampung Municipality there were 461,242 people, in dati II North Lampung there were 1,028,203 people, in dati II Central Lampung with 1,742,620 people, and Dati II South Lampung with 1,625,901 people. The conclusion in this study is that this policy is going well with the development of the North Lampung area which is centered as a target area for local transmigration community acceptance. North Lampung has become a developing area both in the field of development and in the economy since the implementation of the local transmigration policy which has maximized land use in the North Lampung area.*

***Keywords: Local Transmigration, Population, Lampung.***

**KEBIJAKAN TRANSMIGRASI LOKAL DI LAMPUNG TAHUN 1979-1984**

**Oleh**

**INTAN PRATIWI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana**

**SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Sejarah**

**Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN TRANSMIGRASI LOKAL DI  
LAMPUNG TAHUN 1979-1984**

Nama Mahasiswa : **Intan Pratiwi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1913033017**

Program Studi : **Pendidikan Sejarah**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Pembimbing Utama

**Drs. Maskun, M.H.**  
NIP. 195912281985031005

Pembimbing Pembantu

**Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 199301292019031010

Ketua Jurusan,  
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

**Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**  
NIP 197411082005011003

Ketua Program Studi,  
Pendidikan Sejarah

**Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum.**  
NIP 19700913200812202





**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

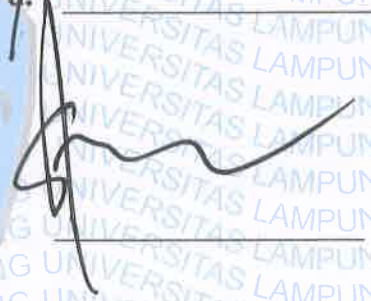
**Ketua : Drs. Maskun, M.H.**



**Sekretaris : Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd.**



**Penguji Utama : Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.**



**2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

  
**Prof. Dr. Sunyono, M.Si.**

**NIP. 196512301991111001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Agustus 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Intan Pratiwi

NPM : 1913033017

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP Unila

Alamat : Jl. Amd. Tanjung Menang Kec. Merbau Mataram Kab.

Lampung Selatan Provinsi Lampung.

dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar lampung, 01 Juli 2023



Intan Pratiwi

NPM. 1913033017

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Karang Raja pada tanggal 18 Mei 2001. Anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Kaimin dan Ibu Ponasih. Pendidikan penulis mulai dari SD Negeri 1 Baru Ranji (2008-2013), melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 2 Merbau Mataram (2013-2016), kemudian melanjutkan ke sekolah menengah SMA Negeri 1 Tanjung Bintang (2016-2019). Setelah itu penulis melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Lampung pada tahun 2019 melalui tes SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Selama dibangku perkuliahan penulis banyak mengikuti kegiatan organisasi baik di dalam kampus maupun diluar kampus. Organisasi di luar kampus yaitu *World Cleun-Up Day* Regional Lampung (WCD Lampung) pada tahun 2020. Kemudian penulis juga tergabung dalam kegiatan Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemdikbud RI yaitu Program Magang Studi Independent Bersertifikat (MSIB) di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jakarta dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung tahun 2022.



## **MOTTO**

*“Ingatlah hidup adalah perpindahan dari satu cobaan ke cobaan lainnya. Cobaan tidak selalu identik dengan kesusahan, tapi bisa juga berupa kemudahan.”*

**(Abdullah Gymnastiar)**

## **PERSEMBAHAN**

### **Bismillahirrahmanirrohim**

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya. Sholawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur, ku persembahkan sebuah karya ini sebagai tanda cinta dan sayangku kepada:

Kedua orang tuaku yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, pengorbanan, dan kesabaran. Terima kasih atas setiap tetes keringat, dan yang selalu membimbing dan mendoakanku agar selalu mendapatkan kemudahan dalam menjalankan studi, mendoakan keberhasilanku, sungguh semua yang Bapak dan Mama berikan tak mungkin terbalaskan.

Untuk almamater tercinta

**“Universitas Lampung”**

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil 'aalamin,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi yang berjudul “Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung Tahun 1979-1984.” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd, Wakil Dekan II Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dedy Miswar, S.Si.,M.Pd. Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

6. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd. Pembahasan skripsi penulis, sekaligus ketua Program Studi Pendidikan Sejarah terimakasih Bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah.
7. Bapak Drs. Maskun, M.H. Pembimbing 1 skripsi penulis, terima kasih bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
8. Bapak Rinaldo Adi Pratama, S.Pd., M.Pd., sebagai Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II skripsi penulis, terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah dan para pendidik di Unila pada umumnya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah.
10. Kepada keluargaku terimakasih Bapak, Mama, Mba Kus, Mba Dede, Mas Nano, Mba Dini, dan Dani. Terimakasih karena selalu berada disampingku dan selalu mendoakan yang terbaik untukku.
11. Terimakasih kepada Keponakanku tercinta Unik Imiati Nurfadhillah yang telah memberi semangat serta dukungannya selama saya mengerjakan penelitian.
12. Teruntuk Keluarga besarku, om, tante, paman, bibi, sepupu, alm kakek dan nenek, terima kasih selalu memberi semangat dan dukungannya selama saya menempuh pendidikan.
13. Teruntuk sahabatku Shinta Febriani dan Sherly Alivia terima kasih atas segala semangat dan hiburannya disaat penulis sedang menyusun skripsi.
14. Teruntuk sahabatku Anatasia Ramadanti dan Maria Putri Rosari terima kasih selalu memberi semangat dan dukungannya selama saya menempuh pendidikan dan saat melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi.



15. Teruntuk sahabat KKN dan PLP ku Nuril Huda, Novan Phasa Hasan, Makrun Sanjaya, Nehemia Setia Ningsih, Qori Ramadhani, Ade Irma Putri Maiditra terima kasih selalu memberi semangat dan dukungannya selama saya menjalankan KKN dan PLP hingga proses penyusunan skripsi.
16. Teruntuk masyarakat Desa Trimomukti terkhusus Bapak Mul dan Ibu Mul, terimakasih telah menjadi keluarga kedua setelah orang tuaku.
17. Teman-Teman PA Indah Mutia Rahma dan Syahna Ardani yang telah memberikan arahan dan saran yang baik selama penulis menempun perkuliahan dan penulisan skripsi.
18. Teman-teman seperjuangan di Pendidikan Sejarah angkatan 2019 Rizky, Rey, Syanila, Latifah, Tina, Renata, Uning, Dewi, Monic, Ajeng, Feni, Gita, Meta, Nunung, Euis, Friska, Cantika, Ikhsan, Nuril, dan teman-teman lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya, semua kenangan manis, cinta dan kebersamaan yang tidak akan pernah saya lupakan selama kita melaksanakan kegiatan perkuliahan di Prodi Pendidikan Sejarah tercinta ini.
19. Yang terkasih Lucky Akira terimakasih sudah hadir dalam kehidupan penulis, tak banyak kata yang dapat penulis ucapkan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan.
20. Semua teman-teman dan narasumber yang membantu penulis selama proses penulisan skripsi, observasi dll. terimakasih atas suport dan bantuannya. Semoga allah selalu membalas kebaikan orang-orang yang terlibat dalam skripsi ini dari awal penulisan hingga akhir.

Semoga hasil penulisan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan atas semua yang telah kalian berikan.

Bandar Lampung, Maret 2023

Intan Pratiwi

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Kerangka Berfikir.....	6
1.6 Paradigma Penelitian.....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori Kebijakan.....	8
2.2 Konsep Kondisi Sosial Ekonomi .....	10
2.3 Konsep Masyarakat Daerah Transmigran .....	11
2.4 Konsep Transmigrasi Lokal .....	13
2.5 Penelitian Relevan.....	14
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	17
3.2 Metode Penelitian.....	17
3.3 Metode Yang Digunakan.....	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	21
3.4.1 Teknik Kepustakaan .....	21
3.4.2 Teknik Dokumentasi .....	22
3.5 Teknik Analisis Data .....	22
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>4.1 HASIL</b> .....	<b>24</b>
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Lampung Tahun 1979-1984 .....	24
4.1.2 Topografis Daerah .....	25
4.1.3 Luas Wilayah, Kependudukan, dan Tata Guna Lahan .....	26
4.1.4 Kehidupan Masyarakat Lampung sebelum diterapkannya Transmigrasi Lokal .....	28
4.1.4.1 Kehidupan Sosial .....	28

4.1.4.1.1. Pendidikan.....	28
4.1.4.1.2. Luas Wilayah dan Kependudukan .....	32
4.1.4.1.3. Mata Pencaharian, Suku, dan Agama .....	36
4.1.1.2 Kehidupan Ekonomi .....	39
4.1.5 Dampak Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung .....	40
4.1.5.1 Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 06/Men/1979.....	40
4.1.5.2 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/571/ BAPPEDA/HK/1979.....	41
4.1.5.3 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/074/DPD/HK/1980 .....	43
4.1.5.4 Peraturan Daerah Provinsi daerah Tingkat I Lampung Tahun 1983.....	43
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>47</b>
4.2.1 Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung tahun 1979-1984 .....	47
4.2.1.1 Dampak Sosial.....	47
4.2.1.2 Dampak Ekonomi .....	49
4.2.2 Pembangunan Dati II Lampung Utara .....	56
4.2.3 Pembangunan Dati II Lampung Selatan .....	62
4.2.4 Pelaksanaan Program Kebijakan Transmigrasi Lokal tahun 1979-1984.....	66
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran.....	72
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
 <b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Bagan Analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana .....	22
Gambar 2. Peta Perwilayahan Pembangunan dan Pusat Pertumbuhan .....	24
Gambar 3. Tabel Jumlah Kecamatan, Desa, Kepala Keluarga, dan Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 1974-1980 .....	28
Gambar 4. Tabel Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhannya Hasil Sensus 1961, 1971, 1980 .....	29
Gambar 5. Jumlah Sekolah di berbagai daerah di Lampung .....	30
Gambar 6. Jumlah Murid di berbagai daerah di Lampung .....	30
Gambar 7. Jumlah Guru di berbagai Daerah di Lampung .....	31
Gambar 8. Jumlah Penduduk di Kabupaten Lampung Utara Tahun 1970 ....	32
Gambar 9. Luas Wilayah di Kabupaten Lampung Utara tahun 1975-1985 ..	33
Gambar 10. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan .....	34
Gambar 11. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah .....	35
Gambar 12. Pembangunan Daerah Tingkat II dalam Rancangan Repelita IV	44
Gambar 13. Peta Rencana Pemekaran Dati II .....	55
Gambar 14. Kondisi jalan di Dati II Lampung Utara antara tahun 1982/1985 .....	58
Gambar 15. Gambar Tabel Komoditi Pertanian di Lampung Selatan .....	63
Gambar 16. Data Jenis Ternak Kabupaten Lmapung Selatan .....	64
Gambar 17. Foto data jumlah penumpang Pelabuhan Bakauheni tahun 1981-1983 .....	65



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Kepres No. 59 Tahun 1984 .....	78
Lampiran 2. SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 1979 .....	82
Lampiran 3. Peraturan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung .....	83
Lampiran 4. Buku Repelita IV Provinsi Lampung .....	88
Lampiran 5. Jumlah Pertumbuhan Penduduk Lampung Tahun 1971-1989 ....	89
Lampiran 6. Kepadatan Penduduk Lampung Tahun 1982 .....	90
Lampiran 7. Proyeksi Pembangunan Penduduk Lampung berdasarkan Umur	91
Lampiran 8. SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung .....	92
Lampiran 9. Publikasi Lampung dalam Angka Tahun 1977 .....	95
Lampiran 10. Jumlah Sekolah, Murid, Kelas dan Guru SD, SMP dan SMTA	96
Lampiran 11. Perkiraan Daya Tampung Pendidikan Dasar .....	97
Lampiran 12. Perkiraan Daya Tampung SMP dan SMTA .....	98
Lampiran 13. Statistik Persekolahan Provinsi Lampung .....	99
Lampiran 14. Jumlah Bangunan Sekolah Baru .....	100
Lampiran 15. Perkiraan daya tampung sekolah .....	101
Lampiran 16. Peta Provinsi Lampung tahun 1980 .....	102
Lampiran 17. Surat Balasan Penelitian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung .....	103
Lampiran 18. Surat Izin Penelitian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung .....	104

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional. Sebagai modal dasar, penduduk tidak hanya sebagai sasaran pembangunan, tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Sementara itu jumlah penduduk yang besar bukan jaminan keberhasilan suatu pembangunan. Peningkatan jumlah penduduk yang besar tanpa adanya peningkatan kesejahteraan justru bisa menjadi bencana, yang pada gilirannya dapat menimbulkan gangguan terhadap program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Selain itu juga akan dapat menimbulkan berbagai kesulitan bagi generasi yang akan datang.

Pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu indikator pencapaian kesejahteraan penduduk, namun peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tidak diiringi dengan peningkatan sumberdaya manusia sehingga menimbulkan peningkatan angka pengangguran, atau dengan kata lain di tempat yang jumlah penduduknya tinggi akan lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu pencapaian kesejahteraan harus diikuti dengan pemerataan penduduk, karena dengan pemerataan penduduk dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh peluang kerja yang lebih memadai. Salah satu program yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah Transmigrasi. Adanya Transmigrasi masyarakat diharapkan lebih mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Tahun 1905, ketika pemerintah Hindia Belanda melaksanakan *Kolonisatie* di wilayah Karesidenan Lampung, pemerintah kolonial Belanda mendatangkan sebanyak 155 kepala keluarga asal Desa Bagelen, Karesidenan Kedu. Para migran tersebut ditempatkan di kawasan Gedongtataan. Mereka kemudian mendirikan

Desa Bagelen untuk menamai kawasan mereka. Pemindahan pertama atau *kolonisatieproof* diikuti dengan migrasi berikutnya yang berlangsung hingga tahun 1911 dalam masa Gubernur Jenderal A.F.W. Idenburg (1909-1916). Kegiatan *Kolonisatie* ini merupakan transmigrasi pertama yang dilakukan di Provinsi Lampung (Halwi, 2014).

Perkembangan penduduk yang terus meningkat terhitung sejak tahun 1955 telah ditransmigrasikan sebanyak 5.491 Kepala Keluarga ke Lampung Selatan. Tahun 1955 sampai 1969 dipindahkan lagi sebanyak 5.333 Kepala Keluarga yang ditempatkan di lokasi transmigrasi seperti Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjungan, dan Kecamatan Kedaton. Tahun 1974 kembali ditransmigrasikan sebanyak 874 Kepala Keluarga yang ditempatkan di Kecamatan Palas dan Kecamatan Panengahan.

Melihat dari daerah penempatan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat transmigrasi hanya berpusat di Dati II Lampung Selatan saja, sedangkan secara administratif Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dibagi menjadi 4 Daerah Tingkat II yaitu : Kotamadya Bandar Lampung (dahulu Tanjungkarang-Telukbenteng dan dengan PP No.24 tahun 1983 menjadi Bandar Lampung), Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Utara.

Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Daerah Tingkat II Lampung Utara merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah tetapi memiliki luas wilayah dan potensi wilayah dalam bidang pertanian dan perkebunan yang cukup luas jika dibandingkan dengan daerah Tingkat II Lampung Selatan. Kelangkaan penduduk dan sumber daya manusia mengakibatkan Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Daerah Tingkat II Lampung Utara tidak maksimal dalam proses pemanfaatan maupun pengolahan sumber daya alam. Sehingga hal tersebut mengakibatkan ketertinggalan Dati II Lampung Utara dan Dati II Lampung Tengah pada bidang perekonomian, sosial, dan pembangunan.

Permasalahan tersebut kemudian dianggap oleh pemerintah sebagai penghambat kemajuan Provinsi Lampung. Sehingga pemerintah berfikir untuk membuat kebijakan baru untuk menyelesaikan permasalahan persebaran penduduk.

Kebijakan baru tersebut yaitu Transmigrasi Lokal atau pemindahan penduduk Lampung ke daerah lain di Provinsi Lampung yang memiliki kepadatan penduduk relatif rendah serta memiliki wilayah yang relatif luas.

Kebijakan Transmigrasi Lokal mulai diterapkan sejak tahun 1979 sampai dengan 1984 dimana penduduk yang dipindahkan adalah penduduk dari Daerah Tingkat II Lampung Selatan menuju Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Daerah Tingkat II Lampung Utara. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung Tahun 1984 tentang tempat asal atau pengiriman dan lokasi penempatan Transmigrasi Lokal bahwa daerah penempatan terletak di Kecamatan Tulang Bawang Ilir dan Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara (Budianto, 2022).

Adapun kebijakan tersebut membawa dampak yang cukup baik bagi kemajuan Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan daerah Tingkat II Lampung Utara, dimana Dati II Lampung Tengah dan Dati II Lampung Utara memiliki persebaran penduduk yang cukup merata hal itu dilihat melalui sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS tercatat bahwa jumlah penduduk Lampung Utara pada tahun 1970 berjumlah 464.834 jiwa, tahun 1980 meningkat menjadi 883.379 jiwa dan tahun 1982 berjumlah 1.028.203 jiwa. Sedangkan Lampung Tengah pada tahun 1970 memiliki kepadatan penduduk dengan jumlah 998.500 jiwa, tahun 1980 berjumlah 1.703.275 jiwa dan tahun 1982 berjumlah 1.742.620 jiwa (Publikasi No. 27/LPG dari Bappeda dan Kantor Sensus & Statistik Propinsi Lampung, 1978).

Tujuan kebijakan Transmigrasi Lokal yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan tujuan dari program transmigrasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) III yaitu orientasi transmigrasi adalah persebaran penduduk dan membangun masyarakat baru untuk membantu pembangunan daerah asal dan daerah transmigrasi. Sejak tahun 1979/1980 Lampung sudah tidak menerima penempatan transmigran. Kalaupun ada penduduk yang ditransmigrasikan itu merupakan sisa proyek transmigrasi pada tahun-tahun sebelumnya yang baru dapat direalisasikan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pada kurun tahun 1980/1981 menjadi masa pembinaan bagi para transmigran saja.

Berdasarkan penelitian milik Rony Hermawan bahwa program transmigrasi lokal yang menetapkan wilayah Lampung Utara menjadi daerah penempatan masyarakat



transmigrasi telah dicadangkan tanah di Kabupaten Lampung Utara seluas 110.500 Ha, dan yang telah berpenduduk sekitar 13.541 Ha. Selain itu, para pemukim baru juga diberikan bantuan berupa bahan-bahan perumahan, pangan, alat pertanian, bibit pertanian, dan bantuan kesehatan bersumber dari bantuan APBD, APBN, dan bantuan Presiden. Adapun beberapa daerah yang disiapkan oleh pemerintah sebagai daerah target penempatan masyarakat transmigrasi lokal di Lampung Utara yaitu, Banjit, Pakuan Ratu, Tulang Bawang dan Mesuji. Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Lampung No.G/074/DPD/HK/1980 tanggal 26 April 1980.

Alasan lain diterapkannya kebijakan translok adalah peningkatan penduduk per tahun 5,82%. Dari penduduk itu 80% berusaha di sektor pertanian dan tinggal di pedesaan. Areal hutan di Lampung 1.272.144 Ha terdiri dari hutan lindung seluas 314.858 ha. Hutan Suaka Alam 394.630 ha, hutan produksi termasuk HPH 502.606 ha. Jadi luas hutan seluruhnya 1.212.094 ha. Dari hutan seluas itu yang masih efektif hanya 19,32% sedang 51,94% telah dijadikan daerah pemukiman dan usaha pertanian. Setelah diinventarisir maka penduduk yang mendiami daerah kawasan hutan/catchmen area : 43.347 Kepala Keluarga atau 170.903 jiwa. Mengingat bahwa fungsi hutan adalah berperan dalam peningkatan pembangunan di bidang pertanian (berfungsi sebagai hidrologis, irigasi), maka jika hutan dirusak, dihuni/dijadikan tempat pemukiman akan berakibat rusak dan kurang produktivitas penggunaan tanah, rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup serta ancaman/bencana bagi masyarakat.

Pemerintah kemudian mengambil tindakan untuk mengamankan daerah hutan dan daerah aliran sungai agar bebas dari penghunian penduduk. Maka diadakan pemindahan penduduk/pemukiman kembali dari :

- a. daerah kawasan hutan.
- b. daerah yang terkena proyek strategis.
- c. daerah yang padat penduduknya, ke daerah-daerah yang telah direncanakan dan ditentukan sebagai tempat pemukiman baru.

Adapun target yang diharapkan pemukiman kembali penduduk selama Pelita III dengan prioritas penduduk yang bermukim di kawasan hutan lindung :

- a. Tahun 1980/1981 = 5.000 kepala keluarga.
- b. Tahun 1981/1982 = 10.000 kepala keluarga.
- c. Tahun 1982/1983 = 10.000 kepala keluarga
- d. Tahun 1983/1984 = 10.000 kepala keluarga.

Jumlah = 35.000 kepala keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung Tahun 1979-1984”. Pemilihan rentang tahun 1979-1984 karena pada tahun tersebut pemerintah baru mulai melaksanakan Program Transmigrasi Lokal di Provinsi Lampung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apasajakah dampak sosial dan ekonomi kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung 1979-1984?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui apasajakahkah dampak sosial dan ekonomi kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung 1979-1984.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan, Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah serta tujuan dari penelitian ini, yaitu mengenai

konsep-konsep dalam kesejarahan tentang Implementasi Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung pada tahun 1979-1984.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

a. Bagi Universitas Lampung

Membantu civitas lainnya untuk dijadikan bahan mengembangkan pengetahuan, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung tahun 1979-1984.

b. Bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam menganalisa menegnai Implementasi Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung tahun 1979-1984.

c. Bagi Penulis

Menambah wawasan bagi penulis akan kesejarahan yakni mengenai Implementasi Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung tahun 1979-1984.

d. Bagi Pembaca

Memperluas pengetahuan akan salah satu sejarah Indonesia yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung tahun 1979-1984.

#### **1.5 Kerangka Berpikir**

Transmigrasi Lokal merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan guna menyelesaikan permasalahan terkait pemerataan jumlah penduduk Lampung. Pemerataan jumlah penduduk Lampung sangat berpengaruh pada berbagai bidang pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, perekonomian, pendidikan, pariwisata dan Kesehatan. Ketimpangan jumlah penduduk daerah satu dengan daerah lainnya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan daeah Lampung.

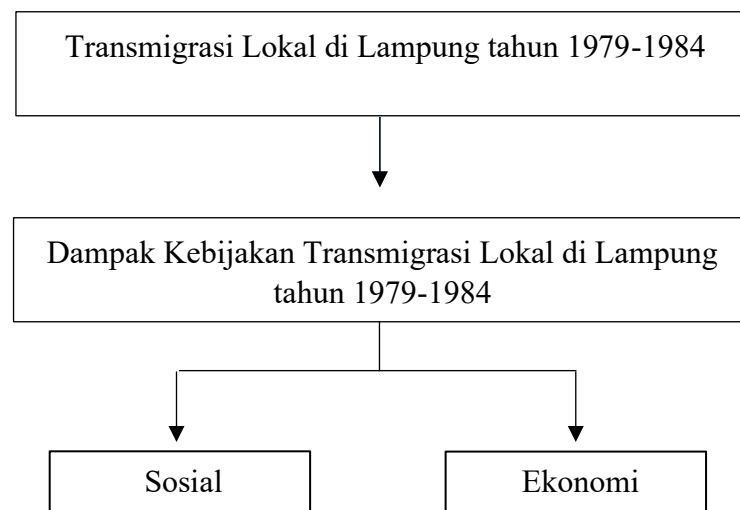
Program Transmigrasi Lokal yang dijalankan pemerintah Lampung tidak semerta-merta hanya mementingan kemajuan daerah Lampung tetapi juga memikirkan kesejahteraan masyarakat dimana masyarakat yang menghuni daerah padat seperti Lampung Bagian Selatan cenderung tidak memiliki lapangan pekerjaan dan tanah untuk digarap. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha untuk mensejahterakan rakyat

melalui program transmigrasi lokal dimana setiap kepala keluarga yang dipindahkan akan mendapatkan tanah sekitar 2 Ha.

Pemilihan daerah target penempatan transmigrasi lokal disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah dan daerah yaitu dipilih daerah yang penduduknya relatif rendah dan masih tersedia lahan untuk perumahan. Serta pemilihan daerah target penempatan harus mementingkan pemanfaatan lahan baik untuk perumahan, persawahan, atau perkebunan dan Kawasan hutan lindung.

Kebijakan transmigrasi lokal diharapkan dapat menjawab semua permasalahan pemerintah Lampung terkait kependudukan diahun 1980-an karena pada tahun tersebut pemerintah juga menutup daerah Lampung sebagai daerah penerima masyarakat transmigran dari luar Lampung dan memfokuskan untuk pembangunan manusia di Lampung melalui program transmigrasi lokal. Melalui rencana pembangunan lima tahun (repelita) pemerintah menjalankan berbagai kebijakan seperti program pembangunan, perbaikan infrastruktur, dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pembangunan di daerah.

### 1.6 Paradigma Penelitian



Keterangan:

—————> : Garis hubungan

————— : Garis Akibat



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Kebijakan**

Istilah kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris (*policy*). Secara sederhana kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan dalam pengambilan keputusan. Timtus (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Timtus, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem ,oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action orientrd*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan pengertian kebijakan publik menurut Thomas Dye yang dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik karangan Edi Suharto adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan tau tidak melakukan (*Public policy is whatever goverentments choose to do or not to do*). Konsep itu sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah disamping yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi sesuatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Suharto, 2014).

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik yang dikutip dari buku Analisis Kebijakan Publik karangan AG. Subarsono, sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik

dapat dipengaruhi oleh pars aktor dan faktor dari luar pemerintah dari definisi tersebut kita dapat membuat rumusan pemahaman tentang kebijakan publik :

1. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara, atau administrator public. Jadi kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
2. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang perorang atau golongan.
3. Dikatakan kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh Iebih banyak atau Iebih besar dari pengguna langsungnya (Subarsono, 2013).

Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah rekasi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupa merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan Kebijakan publik, biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak melakukan tindakan tertentu
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-

langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Berdasarkan teori-teori kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya maka pada penelitian ini menganut teori kebijakan menurut Timtus yang mana sebuah kebijakan muncul tak lain adalah untuk memecahkan sebuah permasalahan. Kebijakan tersebut tak semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan tetapi juga memiliki tujuan kedepannya. Hal ini sesuai dengan dikeluarkannya kebijakan Transmigrasi Lokal selain untuk menyelesaikan sebuah permasalahan terkait pemerataan jumlah penduduk, transmigrasi lokal juga memiliki tujuan yaitu menyejahterakan rakyat.

## **2.2 Konsep Kondisi Sosial Ekonomi**

Kondisi sosial ekonomi merupakan suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Lebih berpendidikan
2. Mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, pekerjaan dan pengenalan diri terhadap lingkungan
3. Mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar
4. Mempunyai ladang luas
5. Lebih berorientasi pada ekonomi komersil produk
6. Mempunyai sikap yang lebih berkenaan dengan kredit
7. Perkerjaan lebih spesifik (Basrowi, Juariyah, 2010).

Lebih lanjut (Langumadi, 2017) dalam penelitiannya mengungkapkan tinjauan sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi perumahan, kesehatan, pendapatan dan pekerjaan. Penjelasan di atas memandang tingkat pendidikan, pemilikan modal, usaha, kesehatan, perumahan, pendapatan dan pekerjaan menggambarkan seseorang memiliki status sosial ekonomi dalam masyarakat. Sementara dalam penelitiannya (Basrowi, Juariyah, 2010)

mengungkapkan kondisi sosial ekonomi adalah posisi individu dan kelompok yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang berlaku umum tentang pendidikan, pemilikan barang-barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Pendapat ini menambahkan unsur interaksi sosial yang dapat diwujudkan dalam partisipasi dalam aktivitas kelompok.

Menurut (Sukirno, 2004) kondisi sosial ekonomi adalah sama pengertiannya dengan membahas suatu aspek kehidupan masyarakat yang bersangkutan, hal ini mengingat bahwa adanya kenyataan kehidupan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat ekonomi akan tetapi ditentukan pula faktor-faktor non ekonomi atau faktor sosial, bahkan dapat dikatakan faktor sosial juga dapat menentukan tingkat ekonomi seseorang dan juga sebaliknya faktor ekonomi menentukan status sosial seseorang dalam lingkungan sosialnya. Pendapat tersebut menegaskan bahwa faktor sosial dan faktor ekonomi saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, kedua hal tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini sebanding dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Lampung yang terdampak program kebijakan transmigrasi lokal dimana masyarakat tersebut mengalami perubahan kehidupan sosial dan ekonomi mulai dari struktur masyarakat, tingkat pendidikan, perubahan cara bercocok tanam, perubahan pendapatan ekonomi di daerah.

### **2.3 Konsep Masyarakat Daerah Transmigran**

Masyarakat adalah adanya sejumlah orang atau individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu yang mengadakan hubungan dan terikat oleh rasa solidaritas dan kepentingan bersama serta sadar akan norma-norma yang mengatur mereka dalam beradaptasi (Langumadi, 2017) Daerah transmigran merupakan daerah yang dihuni oleh masyarakat transmigran maupun non transmigran. Masyarakat transmigran adalah masyarakat yang mengikuti program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sementara masyarakat

non transmigran adalah masyarakat lokal ataupun masyarakat asli yang sudah menetap di daerah tersebut sebelum adanya program transmigrasi.

Penjelasan di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nova, 2016) membagi subjek penelitiannya ke dalam tiga golongan yaitu masyarakat transmigrasi umum, transmigrasi lokal dan masyarakat asli. Masyarakat transmigrasi umum merupakan masyarakat mengikuti program transmigrasi yang disponsori dan dibiayai secara keseluruhan oleh pemerintah melalui Depnakertrans. Jika dilihat masyarakat transmigrasi umum berasal dari luar Pulau Sulawesi. Masyarakat transmigrasi lokal merupakan masyarakat yang berpindah dalam satu daerah saja, seperti dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dan bahkan mungkin terjadi dalam satu provinsi.

Program transmigrasi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut (Maruwae, 2020) transmigrasi merupakan alternatif penting dalam rangka memecahkan masalah kepadatan penduduk khususnya di Pulau Jawa. Masyarakat yang mengikuti program transmigrasi, pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, yang tidak mempunyai lahan yang cukup untuk mengembangkan usaha-usaha pertanian. ketersediaan lahan di tempat transmigrasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya jika dibandingkan sebelum mengikuti program transmigrasi.

Dalam konteks program dan sasaran transmigrasi pada program translok, daerah transmigran yaitu Lampung Utara yang terdiri dari daerah Banjit, Pakuwon Ratu, Tulang Bawang dan Mesuji bertransformasi menjadi tempat tinggal menetap bagi masyarakat dari berbagai etnis yang saling berinteraksi dalam membangun kerukunan dan kebersamaan serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan hidupnya terbukti dengan adanya perubahan cara bercocok tanam pada masyarakat untuk memanfaatkan lahan secara maksimal. Secara keseluruhan, masyarakat

daerah transmigran dimaknai sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan tinggal di tempat tujuan transmigrasi dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dengan latar belakang etnis maupun agama yang berbeda-beda.

#### **2.4 Konsep Transmigrasi Lokal**

Transmigrasi merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka pemecahan masalah kependudukan, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Transmigrasi di cap sebagai program sentralistik, pemindahan kemiskinan, deforestasi, jawanisme, dan pelanggaran, hak asasi manusia. Pendapat lain mengenai transmigrasi adalah perpindahan dalam hal lain ini memindahkan orang dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negarandalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang (Manuwiyoto, 2008).

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang ini bahwa yang dimaksud dengan transmigrasi dan transmigran yaitu Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangkan Transmigran adalah warga Negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela kekawasan transmigrasi. Adapun program trasnmigrasi ditunjukkan untuk dua hal yaitu untuk memberikan peluang berusaha dan kesempatan bekerja untuk pemberdayaan sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan dikekola. Kemudian untuk jangka Panjang, adalah untuk menciptakan kondisi yang mendorong terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pilar utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Legiani, 2018).

Transmigrasi terbagi menjadi beberapa jenis yaitu transnigrasi umum, transmigrasi swakarsa atau transmigrasi spontan, dan transmigrasi lokal. Transmigrasi umum adalah transmigrasi dimana semua biaya untuk transmigrasi ditanggung oleh pemerintah. Transmigrasi swakarsa atau transmigrasi spontan adalah transmigrasi yang dilakukan penduduk dengan sebagian biaya ditanggung sendiri dan Sebagian lain ditanggung oleh pemerintah. Transmigrasi Lokal adalah pemindahan penduduk

dari suatu wilayah ke wilayah lain yang masih satu pemerintahan daerah provinsi (Yusuf, Giyarsih, 2015).

Transmigrasi lokal dapat dipahami dengan perpindahan penduduk dalam satu daerah saja. Pindah tersebut bersifat setempat, misalnya dari satu ingkup provinsi. Pendapat lain dari (Arman, 2006) transmigrasi lokal yaitu perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang masih satu pemerintahan daerah provinsi (Nova, 2016).

Menurut (H.J.Heeren dalam Yusuf, 2015) Transmigrasi Lokal mencakup migrasi dalam daerah tertentu, dari daerah ke daerah lain dalam wilayah provinsi. Umumnya, proses transmigrasi dilakukan secara massal dan adanya dukungan biaya dari pemerintah. Penyebab adanya migrasi tersebut dilatarbelakangi karena mengurangnya tingkat kesuburan tanah sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan tanah. Hal ini menjadi salah satu faktor orang-orang melakukan migrasi.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa transmigrasi lokal adalah perpindahan penduduk dari satu silayah (satu kabupaten ke kabupaten lainnya) dalam lingkup provinsi. Program ini merupakan program yang dibiayai pemerintah dan masyarakat yang menjadi target transmigrasi lokal yaitu masyarakat yang mendiami kawasan padat penduduk seperti Lampung Selatan dan kawasan hutan lindung.

## **2.5 Penelitian Relevan**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan kajian yang hendak dibahas, penelitian dengan topik sejenis antara lain:

1. Penelitian Roni Hermawan tahun 2021 (Skripsi) dengan judul Transmigrasi Lokal Desa Mekar Sari Kabupaten Mesuji Tahun 1982-1986. Penelitian ini berisi tentang dampak transmigrasi lokal terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Mekar Sari Kabupaten Mesuji Tahun 1982-1986. Hasil dari penelitian ini adalah berdampak pada subsektor sosial ekonomi masyarakat Desa Mekar Sari yang meliputi dampak jenis pekerjaan yang telah bervariasi. Pada tingkat



Pendidikan mengalami sedikit peningkatan karena terdapat satu sekolah di UPT dan memiliki jarak yang terjangkau berbeda dengan daerah asal sebelum transmigrasi.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang Transmigrasi Lokal dan tempat penelitian yang sama yaitu di Lampung. Sedangkan, perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada rentang waktu dimana penelitian sebelumnya mengkaji transmigrasi lokal pada tahun 1982—1986 sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tahun 1979-1984.

2. Penelitian Aan Budianto Dkk, (*Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*) dengan judul *Transmigrasi Lokal di Lampung: Varian Kebijakan Perpindahan Penduduk di Indonesia*. Penelitian ini berisi tentang latar belakang diterapkannya kebijakan transmigrasi lokal di Lampung. Hasil analisis dari kajian ini adalah bahwa dampak pemindahan penduduk ke Lampung hingga tahun 1950-an semakin tidak terkendali. Dimulai sejak tahun 1970-an, Transmigrasi Lampung mulai menampakkan hasil pada tahun 1990-an dimana di wilayah Lampung bagian utara mulai menampakkan perkembangan.

Persamaan dari penelitian ini adalah studi kasus penelitian pada masa orde baru yaitu pada tahun 1978-1980 dan memiliki persamaan tempat penelitian yaitu di Lampung. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah, peneliti tersebut hanya terfokus dibagian perubahan cara Bertani, sedangkan dibidang lain peneliti belum memaparkan dengan lengkap.

3. Penelitian milik Yosi Nova tahun 2018 (*Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*) dengan judul *“Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat : Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya”*. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada dampak transmigrasi kepada masyarakat Timpeh Dharmasraya. Kajian pembahasan yang terdapat pada penelitian ini yakni: latar belakang Transmigrasi ke Timpeh, Kondisi sosial masyarakat Timpeh, hingga dampak yang terjadi dari adanya Transmigrasi di Timpeh.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dampak sosial ekonomi akibat adanya kebijakan transmigrasi. Sedangkan perbedaan

pada penelitian ini terletak pada fokus kajian dimana pada penelitian terdahulu fokus kajiannya adalah mengenai dampak transmigrasi sedangkan pada penelitian ini fokus kajiannya adalah implementasi kebijakan transmigrasi.

4. Penelitian milik Warti W tahun 2008 (Disertasi) dengan judul "*Dampak Transmigrasi Lokal Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela*". Penelitian ini memfokuskan dampak transmigrasi lokal pada masyarakat Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela. Kajian pembahasan pada penelitian ini yaitu : latar belakang transmigrasi ke Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela, kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang dampak transmigrasi lokal terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian terdahulu bertempat di Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela sementara pada penelitian ini peneliti memilih daerah Lampung sebagai tempat penelitian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup beberapa aspek, antara lain adalah subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, dan bidang ilmu yang dianggap sesuai dengan isi penelitian. Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung tahun 1979-1984.

1. Objek Penelitian : Implementasi Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung
2. Subjek Penelitian : Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung
3. Tempat Penelitian : Lampung
4. Waktu Penelitian : 2023
5. Bidang Ilmu : Sejarah

#### **3.2 Metode Penelitian**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, tujuan, data dan kegunaan (Sugiyono, 2021).

Pendapat lain mengatakan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu (Darmadi, 2013). Metode dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang sangat penting untuk memecahkan

sebuah permasalahan yang turut menentukan sebuah keberhasilan suatu penelitian. Menurut Winarti Surachmad, metode penelitian adalah suatu cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat tertentu (Surachmad, 1990).

### **3.3 Metode Yang Digunakan**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah juga diartikan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah (Kuntowijoyo, 1995). Metode sejarah dapat dipahami sebagai proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu, yang identik dengan sumber sejarah (Gottschalk, 1986). Merujuk pendapat para ahli memberikan gambaran bahwa metode sejarah merupakan metode yang digunakan untuk memaparkan secara historis suatu kejadian atau perjalanan suatu kejadian. Menulis sejarah dengan teknik yang benar dapat dilakukan pada berbagai topik terutama pada pembahasan yang bernilai sejarah (Hidayat, 2016).

Peneliti menggunakan metode historis karena data yang didapatkan akan diuji dan dianalisis secara kritis baik rekaman dan peninggalan masa lampau dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh yang disebut historiografi.

Metode sejarah meliputi 4 langkah utama. Langkah-langkah penelitian historis yaitu: Heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik adalah teknik atau cara-cara untuk menemukan sumber yang bisa didapat melalui studi kepustakaan, pengamatan secara langsung di lapangan atau melalui interview (Sair, 2012). Heuristik merupakan langkah awal penelitian sejarah dengan kegiatan mengumpulkan sumber sejarah yang menjadi objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tahapan heuristik pada penelitian ini adalah peneliti mengumpulkan data-data terkait kebijakan Transmigrasi Lokal (Translok) baik berupa arsip, surat kabar, jurnal, dokumentasi melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Depot Arsip Provinsi Lampung, Museum Transmigrasi Bagelen, Badan Pusat Statistik, dan Perpustakaan Universitas Lampung.

2. Kritik Sumber pada penelitian sejarah secara umum dibagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern adalah untuk menyelidiki keaslian sumber dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 5W+1H. Sedangkan kritik intern adalah penentuan dapat tidaknya keterangan dalam dokumen digunakan sebagai fakta sejarah ((AB, Yass, 2004). Kritik sumber dalam penelitian sejarah berfungsi untuk mengetahui keaslian sumber sejarah berupa dokumen dan sejenisnya pada penelitian sejarah yang dilakukan.

Kritik sumber dalam penelitian ini adalah peneliti mengerucutkan data-data yang valid sesuai dengan kajian yaitu Kebijakan Transmigrasi Lokal Tahun 1979-1984 sehingga ditemukan data-data yang termasuk yaitu data yang terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dan Depot Arsip Provinsi Lampung berupa Arsip Repelita IV Provinsi Lampung, Pola Umum Pembangunan Dati II Lampung, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Surat Keputusan Gubernur Tk.I Daerah Lampung dan beberapa data lainnya berupa laporan hasil pembangunan daerah Lampung tahun 1980.

3. Interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah sebagai hasil dari langkah sebelumnya yaitu kritik sumber. Interpretasi merupakan penjabaran dari sumber sejarah yang diperoleh baik berupa dokumen maupun hasil wawancara dan observasi.

Tahap interpretasi dalam penelitian ini adalah menjabarkan data-data yang telah didapat dan disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu implementasi kebijakan transmigrasi lokal di Lampung tahun 1979-1984. Penjabaran data tersebut juga disesuaikan dengan rumusan masalah yaitu faktor-faktor diterapkannya Translok dan proses implementasi Translok di Lampung.

4. Historiografi merupakan langkah terakhir dalam sebuah penelitian sejarah. Melakukan penulisan sejarah menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, di uji (verifikasi) dan diinterpretasi merupakan langkah terakhir dalam penelitian sejarah (Daliman, 2012).

Tahap Historiografi, peneliti melakukan penulisan sejarah secara runut dan runtun agar kajian sejarah yang ditulis menjadi gamblang dan mudah dipahami

bagi pembacanya sesuai dengan data yang didapat dan telah dijabarkan sebelumnya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun sample penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena Teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian (Kristanto, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Teknik pengumpulan data berpengaruh terhadap penyusunan sebuah instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data. Maka, Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.4.1 Teknik Kepustakaan**

Teknik kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipustaka seperti dokumen, buku, majalah, dan kisah-kisah sejarah. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Menurut ahli lain yang dijelaskan oleh Sugiyono (2012) studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan tentang budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Teknik kepustakaan merupakan suatu cara seorang peneliti untuk mengumpulkan data-data terkait penelitiannya dengan cara menelaah buku, catatan, maupun dokumen yang tersedia. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan Teknik dokumentasi guna

mendapatkan data-data terkait implemntasi kebijakan transmigrasi lokal di Lampung tahun 1979-1984. Peneliti akan mengkaji dokumen yang tersedia di Kantor Bappeda Provinsi Lampung, Perpustakaan Daerah Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Perpustakaan Universitas Lampung, serta Laboratorium Pembelajaran Sejarah FKIP Universitas Lampung.

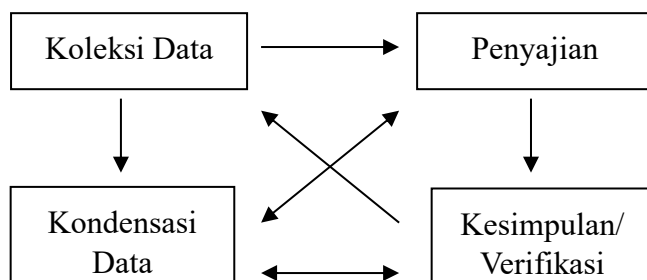
### 3.4.2 Teknik Dokumentasi

Menurut (Sugiono, 2016), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh (Arikunto, 2011) mengatakan bahwa teknik dokumenter adalah teknik yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Sementara itu menurut (Suwandi, 2008) menuliskan bahwa dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap.

Berdasarkan penjelasan di atas maka teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu implementasi kebijakan transmigrasi lokal di Lampung yang terdapat di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung, Perpustakaan Universitas Lampung, dan Laboratorium Pembelajaran Sejarah.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Menurut (Saldana, 2020) analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan dalam menganalisis data seperti tampak pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Bagan Analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana

### 1) *Data Condensation* (kondensasi data)

Data kondensasi mengacu pada proses proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan melalui triangulasi data. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang.

### 2) *Data Display* (penyajian data)

Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Data yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya. Pada umumnya penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, uraian singkat, skema dan lainlain.

### 3) *Conclusion Drawing* atau *Verification* (pengambilan kesimpulan)

Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan suatu proses dimana peneliti menginterpretasikan data dari awal pengumpulan disertai pembuatan pola dan uraian atau penjelasan. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan tentang dampak kebijakan transmigrasi lokal di Lampung tahun 1979-1984 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 06/Men/1979 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No.G/571/ BAPPEDA/HK/1979 dampak sosial dari kebijakan transmigrasi lokal yaitu:
  - Terjadinya perkawinan antar suku
  - Dibentuknya komunitas-komunitas sosial masyarakat
  - Ditransmigrasikan yaitu sekitar 35.000 KK diakhir tahun 1984. Tentunya masyarakat yang ditransmigrasikan terdiri dari berbagai suku dan hal itu membuat proses sosialisasi menjadi lebih heterogen.
  - Pertambahan jumlah penduduk, Anak usia Sekolah Dasar pada tahun 1982/1983 tercatat sebanyak 180.156 orang, dan tertampung pada SD termasuk MIN sebanyak 159.988 orang atau 88,8%. Fasilitas SD tercatat 623 sekolah yang terdiri dari 3.635 ruang kelas dan 5.057 orang guru. SMP tercatat sebanyak 101 buah yang seluruhnya merupakan SMP umum, dan tercatat 20.570 orang murid serta 1.110 orang guru. SMTA sebanyak 21 buah yang terdiri dari 18 SMTA umum dan 3 SMTA Kejuruan yang seluruhnya memiliki 123 kelas, 5.131 orang murid dan 249 orang guru.
  - Selain itu, Tercatat terdapat 29 Puskesmas, 79 Puskesmas Pembantu, 2 Klinik Bersalin serta 2 Apotik pada tahun 1982, serta 1 Rumah Sakit type C dengan kapasitas 125 tempat tidur. Dokter umum terdapat sebanyak 35 orang, 1

Dokter Spesialis Kandungan, 4 Dokter Gigi dan 33 Bidan serta 6 Tenaga Perawat Akademis.

2. Berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. G/074/PDP/HK/1980 dan Peraturan Daerah Provinsi daerah Tingkat I Lampung Tahun 1983 yaitu:

- Dicanangkan tanah di Kabupaten Lampung Utara seluas 110.500 ha.
- Kepada para pemukim baru itu diberikan bantuan berupa bahan-bahan perumahan, pangan, alat pertanian, bibit pertanian dan bantuan kesehatan. Pembiayaan selain dari APBD, APBN juga Bantuan Presiden.
- Pembangunan infrastruktur jalan
- Pembentukan KUD (Koperasi Unit Desa)
- Pemberdayaan pertanian modern
- Lampung Selatan menjadi daerah dengan pengoptimalan wilayah untuk produksi yaitu di wilayah Pagelaran, Gedongtataan, dan Tanjung Bintang.
- Lampung Selatan juga memanfaatkan kawasan wisata untuk sektor pariwisata dan perhubungan yaitu perhubungan laut yang terpusat di Pelabuhan Bakauheni dan perhubungan udara yaitu di Bandar Udara Raden Inten II.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Bagi Peneliti Lain**

Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait Kebijakan Transmigrasi Lokal di Lampung dengan data persebaran penduduk disetiap Kecamatan daerah yang menjadi pusat penempatan program Transmigrasi Lokal.

### **5.2.2 Bagi Pembaca**

Pembaca diharapkan dapat bersifat objektif dan memperhatikan bukti-bukti yang ada sehingga apa yang ingin disampaikan peneliti dapat ditangkap dengan baik dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang nantinya akan menyebabkan konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- AB, Yass, M. (2004). *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Diklat.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*. rineka cipta.
- Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. ombak.
- Darmadi, H. (2013). *Dimensi-dimensi metode penelitian pendidikan dan sosial*. Alfabeta.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti sejarah*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Kristanto. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. CV Budi Utama.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Bentang Budaya.
- Manuwiyoto, M. (2008). *Transformasi Paradigma Baru Pembangunan Transmigrasi*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi Departemen Transmigrasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Miles, Matthew B, Huberman A. Michael , Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis : a methods sourcebook (Terjemah)*. Sage Publications.
- air, A. (2012). *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Proyek SP4 Universitas Sriwijaya.
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik : konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D – MPKK*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Alfabeta.
- Surachmad, W. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teiknik*. Transito.
- Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. rineka cipta.

## **JURNAL**

- Basrowi, Juariyah, S. (2010). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Ekonomi & Pendidikan*, 7(April), 58–81.
- Budianto, A., Mustofa, M. B., & Hasanah, U. (2022). Transmigrasi Lokal di Lampung: Varian Kebijakan Perpindahan Penduduk di Indonesia. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i1.3661>
- Halwi, M., Balai, D., Nilai, P., & Bandung, B. (2014). Perpindahan Penduduk dalam Tiga Masa. *Patanjala*, 6(3), 335–348.
- Hidayat, B. (2016). Aplikasi Penulisan Sejarah Pada Mata Kuliah Sejarah Sosial *Jurnal Historia*, 4, 11–18.
- Langumadi, W. A. P. (2017). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigran di UPT Arongo Desa Persiapan Bosenga Indah Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 1(2), 1–15.
- Legiani, W. dkk. (2018). Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan). *Hermeneutika*, 4(1), 25–38.

- Maruwae, A. (2020). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Transmigran. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 13, 39–53.
- Nova, Y. (2016). Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya. *Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 23–36.
- Publikasi No. 27/LPG dari Bappeda dan Kantor Sensus & Statistik Propinsi Lampung. (1978). Provinsi Lampung Dalam Angka 1977. *Publikasi*.
- Yusuf, Giyarsih, S. R. (2015). Dampak Transmigrasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Warga Transmigran Di Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Bumi Indonesia*, 4(4), 1–11.

## **ARSIP**

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1984 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
- Peraturan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1983 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung.
- Publikasi No. 27/LPG dari Bappeda dan Kantor Sensus & Statistik Propinsi Lampung. (1978). Provinsi Lampung Dalam Angka 1977. *Publikasi*.
- Publikasi No. 13/LPG dari Bappeda dan Kantor Sensus & Statistik Propinsi Lampung. (1980). Provinsi Lampung Dalam Angka 1980. *Publikasi*.
- Rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Reepelita) IV Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1984/1985;1988/1989.
- Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 1979 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Muda Urusan Transmigrasi.
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/571/BAPPEDA/1981 Tentang Tempat Asal/Pengiriman dan Lokasi Penempatan Transmigrasi Lokal